

ABSTRAK

Danti Ayu Indriastuti Lumako. 91711403161040.2021. Tinjauan Yuridis Tentang Asas Perlindungan Maksimum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Korban Kekerasan Seksual Di Luar Negeri. Di bimbing oleh Moh. Irfan Latowale dan Albert Morangki.

Kata Kunci: Asas Perlindungan Maksimum, Tenaga Kerja Wanita

Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas mengatakan, tujuan kemerdekaan adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat asas perlindungan maksimum. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh terhadap setiap warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaturan asas perlindungan maksimum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia korban kekerasan seksual di luar negeri. 2. Bagaimana implementasi asas perlindungan maksimum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia korban kekerasan seksual di luar negeri. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan serta menggunakan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual

Bentuk perlindungan hukum sebagai penjabaran dalam asas perlindungan maksimum terhadap tenaga kerja perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual adalah dalam hal diperlukan bantuan hukum bagi tenaga kerja wanita yang memerlukan perlindungan, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri berkoordinasi dengan penasihat hukum yang ditunjuk untuk mendampingi dan menjamin hak-hak tenaga kerja wanita terpenuhi terkait selama dalam pemeriksaan secara hukum baik di dalam maupun di luar negeri. Bagi TKW yang mendapat ancaman hukuman, menjalani hukuman maupun yang akan dideportasi karena pelanggaran hukum yang dilakukan di luar negeri, Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri mengupayakan langkah-langkah bantuan hukum dan kemanusiaan melalui sistem hukum yang berlaku maupun melalui jalur diplomatik.



ABSTRACT

Danti Ayu Indriastuti Lumako. 91711403161040.2021. **Juridical Review Regarding the Principle of Maximum Protection of Indonesia Female Workers on Victims of Sexual Violence in Abroad.** Supervised by Moh. Irfan Latowale and Albert Morangki.

Keywords: Maximum Protection Principle, Female Workers

The state's obligation to protect its citizens through opening The 1945 Constitution clearly states that the purpose of independence is to form an Indonesian state government that protects all the Indonesian people and the entire homeland of Indonesia. There is a principle maximum protection in law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia. The principle of maximum protection is that the government is obliged to provide full protection on every Indonesian citizen under any circumstances, both inside and outside country.

The formulation of the problem in this study is 1). How is the principle regulate maximum protection for Indonesian female workers who are victims of violence sex abroad?. 2). How to implement the principle of maximum protection against Indonesian female workers who are victims of sexual violence abroad?. The objectives of this research are 1). To find out the principles of maximum protection for Indonesian female workers who are victims of violence sex abroad. 2). To find out the implementation of the principle of protection maximum for Indonesian female workers who are victims of sexual violence abroad. This research uses normative juridical law research, statute approach and conceptual approach.

The form of legal protection as an elaboration of the principle of protection maximum for female workers who are victims of sexual violence is in the event that legal assistance is required for female workers who need protection. The Ministry of Foreign Affairs and Indonesian Representatives abroad in coordination with the appointed legal adviser to assist and ensure that the rights of women workers are fulfilled in relation to legal examination both at home and abroad. For Female Worker who receive a threat of punishment, serve a sentence or are about to be deported due to legal violations committed overseas, the Ministry of Foreign Affairs and Indonesian Representatives abroad seek legal aid measures and humanity through the applicable legal system and through other channels diplomatic.